

IMPLEMENTASI DAMPAK KEBIJAKAN DANA DESA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT di DESA KEDUNGLEREP, KECAMATAN MODO, KABUPATEN LAMONGAN

Shohibul Islami

UIN Sunan Ampel Surabaya

shokibulitachi18@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang dikaji disini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep dan mengetahui dampak dari implementasi-implementasi kebijakan tersebut bagi Masyarakat di Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara secara langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat desa, yang kemudian dideskripsikan dan dianalisa dengan Teori Struktural Fungsional AGIL Talcott Parsons. AGIL Parsons mengandaikan keselarasan suatu sistem dalam mencapai tujuannya, Pemerintah Desa dan Masyarakatnya dapat mencapai tujuannya ketika selaras dengan tahap-tahap sistem sosial, tahap tersebut yaitu Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency. Dari penggabungan hasil data lapangan dan teori dapat diperoleh hasil bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep sudah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMENDes PDTT No.8 Tahun 2022-2023. Akan tetapi, Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep lebih sentralitatif dalam satu bidang yaitu Pertanian, sehingga ranah bidang lain banyak yang terabaikan. Respon Masyarakat Desa dengan kebijakan satu bidang oleh Pemerintah yang lebih ke respon positif dan kurangnya inovasi dan efisiensi Pemerintah Desa Kedunglerep dalam mengimplementasikan Dana Desa akan menjadikan ranah-ranah sentral lainnya seperti ranah Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan akan menjadi penghambat kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Desa Kedunglerep.

Kata kunci : kebijakan, dana desa, kesejahteraan

Abstract

The problem studied here is how the implementation of the Village Fund Policy in Kedunglerep Village and the impact of these policy implementations on the community in Kedunglerep Village, Modo District, Lamongan Regency. Through descriptive qualitative research methods with a direct interview approach with the village government and the village community, which is then described and analysed with Talcott Parsons' AGIL Functional Structural Theory. AGIL Parsons presupposes the harmony of a system in achieving its goals, the Village Government and its Communities can achieve their goals when in harmony with the stages of the social system, these stages are Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency. From combining the

Article History: Received 20 Agustus 2023, Revised 17 Agustus 2023,
Accepted 28 November 2023, Available online 00 November 2023

Copyright: © 2023. Shohibul Islami.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

results of field data and theory, it can be obtained that the Implementation of the Village Fund Policy in Kedunglerep Village has been running in accordance with the provisions of PERMENDESPTT No.8 of 2022-2023. However, the implementation of the Village Fund Policy in Kedunglerep Village is more centralised in one field, namely Agriculture, so that many other fields are neglected. The response of the Village Community to the one-field policy by the Government which is more of a positive response and the lack of innovation and efficiency of the Kedunglerep Village Government in implementing the Village Fund will make other central areas such as the realms of Education, Health, and Empowerment. such as Education, Health, and Empowerment will be an obstacle to the progress and welfare of the Kedunglerep Village community.

Keywords: *policy, village funds, welfare*

A. Pendahuluan

Kebijakan untuk membangun Desa sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,¹ dimana kebijakan baru pemerintah di tahun 2014 untuk membangun kekayaan dan kemajuan melalui Desa Mandiri. Potensi Desa dalam hal ini melingkupi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang ada di Desa dan bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa.² Kesejahteraan Desa hanya bisa diwujudkan apabila berbagai elemen dan komponen Desa turut andil dalam membangun Desa.

Mengenai partisipasi dalam kebijakan yang ada, masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan peraturan Desa, yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Jamaluddin mengungkapkan bahwa partisipasi diperlukan dalam negara demokrasi. Untuk melaksanakan partisipasi warga negara dalam urusan politik, setidaknya harus memperhatikan tiga hal. Pertama, harus ada persaingan dalam arti harus ada persaingan untuk jabatan publik. Kedua, keterlibatan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ketiga, kebebasan berekspresi, dalam hal ini pemerintah tidak boleh menghalangi pergerakan kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi memegang peranan penting, dan bagi setiap individu untuk memantau dan mengontrol kebijakan pemerintah agar tidak terjadi

¹ Selanjutnya disebut undang-undang desa/UU No.6/2014

² Selanjutnya disebut PP No. 43/2014

penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, dan bagi pemerintah untuk mengukur tingkat demokrasi di negara tersebut.³

Dalam pasal 54 UU No.6/2014, pemanfaatan Dana Desa sebagai hal-hal strategis pembangunan Desa, selain diharuskan melibatkan Masyarakat, kegiatan pengalokasian Dana Desa, juga turut melibatkan beberapa *stakeholders*, yang dimaksud *stakeholders* adalah seperti Kepala Desa, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Masyarakat Desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). *Stakeholders* ini diharapkan mampu untuk saling bekerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa.⁴

Dari sini kita akan mengetahui bahwa Masyarakat Desa merupakan bagian penting dari pembangunan dan pengawal dari kebijakan pembangunan Desa dan Alokasi Keuangan Desa yang ada, sehingga Dana Desa yang diterima, Pihak Desa tidak menjadi korban pembangunan dan perselisihan anggaran. Otonomi Desa diciptakan tidak untuk menyebabkan ketimpangan yang disebabkan oleh elit Desa setempat.

Penelitian ini di Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Angka Indeks Desa Membangun (IDM) yang diperoleh nilai 0.6994 dengan status Desa berkembang⁵ berdasarkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Namun dari pengamatan dan observasi peneliti sebagai bagian dari Masyarakat Desa Kedunglerep melihat masih jauh dari kata Desa berkembang, karena masih banyaknya kebijakan pembangunan -pembangunan infrastruktur yang tidak efisien dan tepat dalam pengerjaan dan pembangunannya. Dari paparan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Desa dan bagaimana dampaknya Implementasi Kebijakan Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Kedunglerep.

Fokus penelitian ini adalah meneliti bagaimana kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep dan bagaimana dampak implementasi kebijakan Dana Desa bagi kesejahteraan Masyarakat di Desa Kedunglerep. Tujuan dari

³Media Universitas Indonesia. “Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia”, <https://www.uui.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/>, Data Internet Diakses pada 21 September 2022.

⁴Karimah, F. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 597-602.

⁵Kemendes.go.id. “Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi”, <https://idm.kemendes.go.id/rekomendasi>”, Data Internet diakses Pada 12 Oktober 2022.

penelitian ini adalah untuk mengawal, menganalisis, serta mengetahui dampak kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep, dengan menganalisis secara mendalam realitas fakta lapangan.

Disini Peneliti menggunakan Teori Struktural Fungsional AGIL Talcott Parsons, Talcott Parsons dikenal dengan gagasannya tentang empat imperatif operasional sistem "aksi", yaitu sistem AGIL merupakan sekumpulan fungsi yang dirancang untuk memenuhi satu atau lebih persyaratan sistem. Parsons berpendapat bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan empat subsistem utama, yaitu Adaptasi (*Adaptation*), Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), Integrasi (*Integration*), Pemeliharaan Pola (*Latency*).⁶ Teori ini relevan dengan apa yang ingin diteliti peneliti tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa, yang notabene kebijakan dan aksi "AGIL" adalah kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membangun masyarakat mencapai tujuan kesejahteraannya.

Talcott Parsons menyatakan untuk bertahan hidup, sistem harus melakukan keempat fungsi tersebut⁷: Pertama, Adaptasi (*Adaptation*): sebuah sistem harus melewati masa-masa sulit agar dapat berkembang dan beradaptasi. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan penyesuaian itu berdasarkan kebutuhan kebutuhannya. Kedua, Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Ketika sistem itu dibuat atau terbuat. Maka akan ada hal yang harus menjadi tolak ukur dimana sistem itu dapat dinyatakan berhasil. Ketiga, Integrasi (*Integration*): sistem harus mengatur hubungan komponen-komponennya. Sistem juga harus mengelola hubungan dari tiga fungsi lainnya (*adaptation, goal attainment, dan latency*). Keempat, Pemeliharaan Pola (*Latency*): sistem harus memperlengkapi, memelihara dan meningkatkan baik motivasi individu atau model budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha untuk pencerahan, pemahaman tentang fenomena dan penyelidikannya. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan

⁶Bagong, D. N. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. (Jakarta: Prenada Media, 2004)

⁷Ritzer, G. *Edisi Terbaru Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2004)

penjelasan yang lengkap dalam lingkungan sosial, atau yang bertujuan untuk dapat mempelajari dan juga menjelaskan realitas sosial atau fenomenal dengan mengidentifikasi beberapa variabel yang terkait dengan entitas dan masalah yang diteliti dijelaskan secara jelas dengan diuji di antara fenomena yang diselidiki. Adapun sumber pendekatan penelitian kualitatif dibagi menjadi dua kelompok, antara lain data primer dan data sekunder, data primer ini ditujukan melalui wawancara terkait dengan Implementasi Dana Desa dan dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kedunglerep, informasi dari pihak Pemerintah Desa tentang implementasi Dana Desa di Kedunglerep, respon Masyarakat terkait Dana Desa yang ada di Desa Kedunglerep dan melihat dan menggali pendapat Masyarakat tentang kesejahteraan mereka dari implementasi kebijakan-kebijakan yang ada terkait dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedunglerep. Sedangkan data sekunder sumber data berwujud gambar, dokumentasi, terkait lokasi, waktu dan semua hal yang berkaitan dengan proses wawancara dengan informan. Sumber data sekunder juga bisa berwujud file-file data desa, referensi buku, maupun dari *web* untuk melengkapi data yang sesuai tema penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Dana Desa di Desa Kedunglerep

Dana Desa di Desa Kedunglerep berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1, 2, dan 3 tahun anggaran 2022 Pemerintah Desa Kedunglerep mendapatkan Dana Desa sebesar 786.995.000 juta rupiah.

Hal ini diperkuat dengan apa yang diungkapkan Kepala Desa Kedunglerep yaitu Supriadi.

*“ dana desa yang di desa ini cukup besar, dan desa sangat terbantu dengan adanya dana desa ini, terutama untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat kedunglerep ini, walaupun di tahun kemaren proses pembangunan agak terhambat dikarena adanya pandemi, itu tidak menghalangi rancangan-rancangan program pembangunan desa di desa ini.....”*⁸

⁸Wawancara dengan Supriyadi Kepala Desa Kedunglerep, 17 Februari 2023 di Kantor Balai Desa Kedunglerep.

Implementasi Dana Desa di Desa Kedunglerep ini ditentukan oleh Pemerintah dengan melibatkan Masyarakat Desa Kedunglerep dalam pengambilan keputusan-keputusannya, sejalan dalam pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Desa saat wawancara sebagai berikut:

“musyawarah desa terkait pembahasan kebijakan-kebijakan dana desa ini melibatkan masyarakat desa dari tiap-tiap dusun,...musyawarah desa ini selalu terjadi dan dilakukan setiap akhir tahun sebagai acuan kerja pemerintah desa di tahun selanjutnya,...musyawarah desa ini diikuti oleh pemerintah desa (10 orang) , BPD (5 orang) , RT (10 orang) , RW (3 orang) , PKK (5 orang) , karang taruna (1 orang) , tokoh agama (2 orang) , dan tokoh masyarakat (5 orang)...”⁹

Jadi dari pernyataan selaku Kepala Desa dan Kepala Pemerintahan Desa Kedunglerep, pengambilan keputusan-keputusan dalam rapat Musyawarah Desa, melibatkan seluruh lapisan Masyarakat, mulai dari ketua RT/RW, BPD, PKK, Karang Taruna, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

Dalam pengalokasian Dana Desa di Desa Kedunglerep lebih tersentralisasi ke pembangunan infrastruktur, terutama dalam hal pembangunan di bidang penataan ruang bagi akses Warga Petani Kedunglerep, hal ini dibuktikan dengan dibangunnya jalan-jalan kecil yang dapat menjangkau sawah-sawah yang notabene sulit menjangkau akses ke jalan utama Desa jadi dipermudah, ini diperkuat dengan ungkapan Kepala Desa Kedunglerep yaitu:

“Dana Desa di Desa akan banyak digunakan pembangunan di sektor penataan ruang, karena melihat mayoritas hampir kebanyakan pekerjaan warga Desa Kedunglerep ini petani dan roda perekonomiannya, maka faktor sasaran untuk mensejahterakan masyarakat lebih ke bidang penataan ruang bagi pertanian, jadi sekarang dibangun jalan-jalan masuk akses persawahan warga, rumah burung hantu sawah, dan selain pembangunan di area persawahan ada juga pembangunan drainase desa...”¹⁰

Selain itu, keberlanjutan informasi dari informan yaitu Kepala Desa Kedunglerep menyatakan bahwa kebijakan Dana Desa untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masih kurang terlalu difokuskan oleh desa, di sektor pendidikan. Desa hanya memberi tunjangan kepada guru-guru dalam bentuk

⁹ Wawancara dengan Supriyadi Kepala Desa Kedunglerep, 17 Februari 2023 di Kantor Balai Desa Kedunglerep.

¹⁰ *Ibid*

kegiatan bantuan insentif guru PAUD/TK-RA saja dan tidak ada anggaran untuk pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan, di sektor kesehatan kata informan masih belum ada rencana perbaikan kembali posyandu walaupun tempatnya sudah mulai banyak berporos temboknya akan tetapi masih difungsikan dengan baik, di sektor Pemberdayaan Pemerintah Desa hanya melakukan tindakan bantuan untuk honor operator yang notabene tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pemberdayaan Masyarakat, dan yang terakhir yaitu bagian sub bidang keadaan mendesak , Dana Desa oleh Pemerintah Desa dengan penyaluran BLT sebagai aksi penanggulangan kemiskinan ekstrim.¹¹

Pencapaian dari tujuan Pembangunan yang beberapa tahun tersentralisasi di ranah pertanian, menurut Kepala Desa adalah:

*“capaian keberhasilan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Kedunglerep yang notabene bertumpu pada roda perekonomian ranah pertanian, adalah dengan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), dan pembangunan lain yang menyangkut pertanian yang telah dibangun Pemerintah Desa akan menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan roda perekonomian Desa Kedunglerep”.*¹²

Informasi diatas menjelaskan bahwa Desa Kedunglerep merasa terbantu dengan adanya Dana yang transfer pemerintah pusat yang didasarkan amanat Undang-Undang, PP, dan Permendes PDTT. Penyaluran Dana Desa yang dikurcurkan bertahap Desa-Desa terutama di Desa Kedunglerep, akan bisa membantu pemerintah desa dalam mengontrol dan Mengimplementasikan Dana Desa dengan baik, seperti untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Masyarakat secara spesifik sesuai aturan PermendesPDTT No.8 tahun 2022-2023 tentang penggunaan Dana Desa, PERMENDesPDTT sebagai alat tinjauan dalam mengimplementasikan Dana Desa dengan tepat dan efesien untuk Kesejahteraan Desa.

D. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep

Implementasi kebijakan-kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep ini mengacu kepada PermendesPDTT No.8 tahun 2022 tentang prioritas

¹¹ Wawancara dengan Supriyadi Kepala Desa Kedunglerep, 17 Februari 2023 di Kantor Balai Desa Kedunglerep.

¹² *Ibid.*

penggunaan Dana Desa, yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan selanjutnya diintegrasikan lewat RPJMDes dan RKPDes yang kemudian masuk kedalam prioritas belanja Desa atau APBDes kemudian diterbitkanlah Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa Kedunglerep. Penggunaan Dana Desa di Desa Kedunglerep secara formal dalam laporan realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Kedunglerep berjumlah total nilai 786.955.000 juta rupiah. Dari total nilai keseluruhan Dana Desa Desa diatas, dana yang diterima desa akan melalui tiga tahap. Tahap pertama(40%), Tahap kedua(40%), dan Tahap ketiga(20%) tahun anggaran 2022 dalam satu tahun pengalokasian kebijakan Dana Desa.

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep tidak berjalan sesuai PERMENDes PDTT No.8 pasal 5 dan 6 tahun 2022, bisa dilihat dari hasil wawancara kepada Kepala Desa Kedunglerep tentang kebijakan Dana Desa di Kedunglerep ini. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Pemerintah Desa Kedunglerep hanya merealisasikan kebijakan dana desa hanya pembangunan jalan untuk akses ke sawah (JUT) dan *drainase* sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pelayanan kesehatan, dan keterlibatan kebijakan Dana Desa untuk pendidikan sebagai ranah peningkatan sumber daya manusia hanya sebatas dalam bentuk tunjangan kepada guru-guru, bisa dikatakan bahwa kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep masih belum berjalan sesuai dengan prioritas penggunaannya yang telah diatur dalam PERMENDesPDTT. Hasil wawancara diatas juga diperkuat dengan data Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahap I, II, III dan RKPDes Desa Kedunglerep (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang disitu terdata dengan jelas, apa dan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Dana Desa Dari apa yang diperoleh peneliti dari Kepala Desa dan dari data yang telah diperoleh peneliti dari Desa.

Implementasi kebijakan Dana Desa dapat dibuktikan dengan Formal dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kedunglerep yaitu Pertama, **JUT (Jalan Usaha Tani)** pembangunan jalan usaha tani di beberapa titik diantaranya JUT Embong Dusun Bajul Tahap satu (1) ukuran/volume 333.00 x1.30x0.08 M dengan total anggaran 156.215.000 juta, pemadatan JUT Embong Brongkah Dusun Terban Tahap dua (2) ukuran/volume 150x3x0.25 M dengan total anggaran 40.000.000 juta, dan pembangunan JUT Embong Dusun Bajul Tahap satu (1) Lanjutan dengan ukuran/volume 131.6x1.3x0.8 M dengan total anggaran 64.600.000 juta. Kedua, ***Drainase* Desa**,

pembangunan Drainase Desa ini di Implementasikan kebijakan pembangunannya pada tahap dua (2) yang berukuran/volume 72 x 0.75x 0.25 meter dengan total anggaran 115.000.000 juta, yang kali ini pembangunannya bertempat di Dusun Bajul. Ketiga, **Pembangunan Rumah Burung Hantu** oleh Pemerintah Desa Kedunglerep ini digelontorkan anggaran sebesar 10.000.000 juta rupiah dengan total Rumah Burung Hantu berjumlah 5 unit, yang ditempatkan di sawah-sawah di Desa Kedunglerep, program Rumah burung hantu ini dilaksanakan pada tahap tiga (3). Keempat, **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa** ini anggarkan oleh pemerintah desa yang merujuk kepada PERMENDES PDDT No.8 Pasal 6 yang dimaksudkan bahwa BLT-DD ini sebagai upaya untuk mengatasi dan percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem di Desa kedunglerep. BLT-DD diterima oleh pemerintah desa dari bulan 1 (satu) sampai bulan 12 (dua belas) yang setiap bulannya mendapatkan sebesar 26.400.000 juta rupiah yang setelah diterima oleh pemerintah desa, langsung diberikan kepada warga masyarakat kedunglerep terutama yang berhak menerimanya. Kelima, **Bantuan Insentif Guru Paud dan Insentif Kader Posyandu**, Dalam Laporan Realisasi dan Capaian Keluaran Dana Desa Desa Kedunglerep, Pemerintah Desa Kedunglerep menganggarkan untuk Insentif Guru Paud dan Kader Posyandu sebesar 6.000.000 juta untuk 5 orang Guru Paud Per satu Tahun Dana Desa dan 7.500.000 juta untuk 20 Kader Posyandu per satu tahun Dana Desa. Dan untuk kegiatan *Stunting* Pemerintah Desa Kedunglerep, menganggarkan sebesar 27.000.000 juta untuk 21 Orang.

E. Dampak Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Kedunglerep

Dampak Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa kedunglerep terealisasi dengan tepat dan efektif, dari apa yang dirasakan masyarakat kedunglerep dari kebijakan-kebijakan yang ada, disitulah bisa diketahui tingkat dampak dari dana desa untuk kesejahteraan Masyarakat Desa Kedunglerep. Kesejahteraan bisa tercapai dan terpenuhi ketika Dana Desa diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk semua lapisan Masyarakat Desa Kedunglerep.

Untuk mencapai informasi yang lebih jelas tentang sejahtera atau tidaknya masyarakat kedunglerep dengan Implementasi Kebijakan Dana Desa yang telah dilakukan pemerintah, peneliti melakukan pendekatan dengan beberapa masyarakat Desa dan melakukan beberapa pertanyaan dengan tujuan

untuk menggali respon dan tanggapan Masyarakat Desa Kedunglerep. Dengan pendekatan tersebut akan ditemukan tolak ukur tentang sejahtera atau tidaknya Masyarakat Desa Kedunglerep.

F. Dampak Bagi Masyarakat Petani

Respon Masyarakat Petani yang didapatkan peneliti sangat beragam dengan titik poin pro dan kontra, respon yang pro ditemukan peneliti ketika mendatangi bapak Siono, bapak Samiran yang sawah mereka dilalui JUT dan dekat dengan Rumah Burung Hantu, berbanding terbalik dengan bapak saidi yang sawahnya tidak mendapatkan apa-apa dari JUT dan Rumah Burung Hantu.

Tanggapan positif tentang kebijakan-kebijakan anggaran dana desa diawali dari informan bapak Siono, terutama JUT dan Burung Hantu sebagai berikut:

“menurut saya ya mas, langkah pemerintah desa kedunglerep dengan membangun JUT dan rumah burung Hantu ini sudah tepat, karena banyak fungsinya untuk peningkatan perekonomian petani di desa kedunglerep ini, karena masnya tau sendiri kan, hampir kebanyakan mayoritas pekerjaan penduduk desa kedunglerep ini kebanyakan bekerja sebagai petani. Dari JUT yang melewati persawahan ini ya mas, sangat membantu produktivitas petani dalam mengolah dan memanen hasil pertanian, dan saya rasa masyarakat desa kedunglerep ini bisa dikatakan cukup merasa sejahtera dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang implementasi Kebijakan dana Desa untuk Desa Kedunglerep ini”.¹³

Menurut tanggapan bapak Siono, implementasi kebijakan-kebijakan dana desa oleh pemerintah sudah dilakukan dengan tepat, karena dengan diperbanyak pembangunan di ranah pertanian, yaitu dengan pembangunan jalan usaha tani dan diadakannya rumah burung hantu, bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Desa Kedunglerep.

Hal yang sama dirasakan oleh bapak Samiran, tanggapan bapak Samiran:

“Dana Desa di Desa Kedunglerep ini sudah baik mas ya, soalnya saya sebagai petani merasa sangat terbantu dengan alokasi yang banyak di berlakukan di ranah pembenahan penataan ruang pertanian, yah walau masih belum sebagai salah satu cara mensejahterakan masyarakat

¹³Wawancara dengan Siono, Petani Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Siono.

*sepenuhnya ya mas, tapi langkah pembuatan JUT dan Rumah Burung Hantu itu adalah langkah yang baik, soalnya andai dana desa ini mengabaikan perbaikan ranah pertanian, dipastikan petani akan kesulitan di musim yang banyak gagal panennya dari pada panennya ini, malah menurut saya pembangunan di ranah pendidikan dan kesehatan, itu dilakukan di dana desa-dana desa tahun selanjutnya”.*¹⁴

Menurut pemaparan bapak Samiran diatas, langkah pemerintah yang dari awal lebih banyak pembangunan di ranah pertanian itu sudah baik, karena dengan begitu kesejahteraan Masyarakat Desa Kedunglerep yang Mayoritas Petani, akan terpenuhi kesejahteraannya baik sebagai petani maupun sebagai Masyarakat Desa Kedunglerep, dan harapan lain dari bapak Samiran ialah setelah pembangunan di ranah pertanian maksimal, berharap untuk ranah kesehatan dan pendidikan, maupun pemberdayaan dimaksimalkan.

Kalau ada yang tanggapan-tanggapan yang positif diatas, pastinya ada yang kurang positif, dan hal berbeda dirasakan oleh bapak Saidi yang menurut peneliti lebih kearah kontra tentang dana desa dan kebijakan-kebijakan pemerintah, menurut bapak Saidi:

*“kalau masnya bertanya tentang sejahtera atau tidaknya bagi saya yang merasa gak merasakan apa-apa dari pembangunan pemerintah desa di bidang pertanian, bagi saya mas, masih belum cukup untuk dibilang sejahtera, sejahtera itu kan kalau semua merasakan ya, lah ini hanya sebagian yang merasakan, sawah saya jauh dari jut tersebut begitupun rumah burung hantu, dan untuk BLT-DD tanggapan saya ya lumayan membantu mas..”.*¹⁵

Menurut bapak Saidi tentang pembangunan dan kebijakan-kebijakan dana desa memang benar adanya, akan tetapi menurutnya kurang efisien untuk yang sawah-sawah petani yang tidak terjangkau pembangunan, dan untuk pemerataan jalan di sawah-sawah semua, pastinya akan banyak mengabaikan pembangunan-pembangunan lainnya di tahun-tahun kedepannya.

¹⁴ Wawancara dengan Samiran, Petani Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Samiran.

¹⁵ Wawancara dengan Saidi, Petani Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Saidi.

G. Dampak Bagi Masyarakat Non Petani

Respon Masyarakat non petani adalah respon yang dirasakan pengajar, pengurus posyandu, pedagang dan buruh selep tentang kebijakan Dana Desa dan dampaknya bagi kesejahteraan, yang menurut mereka masih jauh dari kata berdampak untuk kesejahteraan masyarakat, hal ini didukung oleh pengakuan Ervi sebagai pengurus PAUD RA Islamiyah Kedunglerep

“menurut saya sudah lumayan, dari situ dari dana desa pemerintah desa masih melihatkan kepeduliannya kepada guru-guru paud seperti kami,..dan yang masih kurang menurut saya mas..., seharusnya untuk semua guru harusnya juga dapat ya mas, tapi ini diinsentif dana desa di desa saat ini, hanya untuk guru-guru yang belum dapat sertifikasi, dan untuk yang sudah sertifikasi gak dapat mas..”.

Selanjutnya Ervi juga menjelaskan bahwa:

*“untuk harapan saya kedepannya tentang kebijakan dana desa kedunglerep ini, saya berharap pemerintah lebih memperhatikan ranah pendidikan, melihat pemanfaatan dana desa yang ada, untuk saat ini masih fokus di ranah pembangunan pertanian, dan menurut saya itu sangat membantu mas, disini lain selain menjadi guru kan saya dan suami saya petani, jadi kalau sudah maksimal di pembangunan ranah pertanian, ya jangan diabaikan lah ranah pendidikan, kesehatan, dan program-program pemberdayaan, agar masyarakat desa seluruh lapisan baik yang bekerja di ranah pendidikan, kesehatan, pedagang dan pertanian semua sejahtera”.*¹⁶

Disini Ervi sebagai pengajar melihat bahwa pemerintah desa dengan kebijakan-kebijakan Dana Desa masih lumayan ada kepedulian di ranah pendidikan, terlepas dari Musyawarah Desa dan aturan yang tertera di dalam UU PERMENDesPDPTT, Pemerintah Desa Kedunglerep masih dikategorikan sudah sesuai dengan aturan-aturan dalam kebijakan-kebijakannya tentang dana desa. Akan tetapi, disini Ervi yang notabene berkecimpung di ranah pendidikan berharap agar sentralisasi yang ada, agar cepat dibenahi dan pemerintah desa tidak mengabaikan pembangunan di ranah pendidikan, agar perkembangan masyarakat di ranah pendidikan berjalan selaras dengan perkembangan perekonomian desa di ranah pertanian.

¹⁶ Wawancara dengan Ervi, Guru Paud Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Ervi.

Begitupun di ranah kesehatan, pengurus posyandu jumani dengan kebijakan yang ada dari dana desa untuk ranah kesehatan mendukung pendapat dari Ervi, menurutnya jumani:

“pendapat saya sebagai kader posyandu, merasa sangat terbantu dengan dapatnya insentif untuk kader-kader posyandu, gimana ya mas, kita kan mengabdikan untuk kesehatan masyarakat, ya sudah selayaknya lah dapat insentif dari Program kebijakan DD tersebut...untuk pendapat saya dari kebijakan-kebijakan yang sekarang, tadi kan mas bilang terlalu banyak program pembangunan untuk pertanian, buat saya itu juga bagus mas, karena program pembangunan ya harus fokusin satu-satu dan dimaksimalkan, kalau sudah maksimal baru ke program ranah lainnya, seperti program peningkatan pembangunan di ranah pendidikan sebagai capaian untuk meningkatkan SDM, program membangun atau memperbaiki gedung kesehatan, dan ranah-ranah lainnya lah mas,..”¹⁷

Tanggapan dari Jumani sebagai pengurus posyandu merasa pembangunan sudah efektif dan efisien, dan menurut Jumani Pemerintah jangan sampai mengabaikan ranah kesehatan, karena disini untuk pelayanan di ranah kesehatan bisa dikategorikan masih kurang untuk Masyarakat Desa Kedunglerep, mulai dari gedung posyandunya yang cuma satu dengan pos kesehatannya dan peralatan-peralatan kesehatannya. Karena kalau hanya penganggaran untuk insentif dan program-program stunting dan sejenisnya, menurut jumani ini masih dirasa kurang, dan pemerintah desa harus memperhatikannya, karena Kesejahteraan Masyarakat itu selaras dengan Kesehatan Masyarakat itu sendiri.

Dari dua informasi diatas antara Informasi dari informan pendidik dan pengurus kesehatan tersebut diatas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Kedunglerep masih belum sepenuhnya fokus di ranah pembangunan dan pembenahan di pelayanan publik ranah pendidikan dan kesehatan, pemerintah dengan anggaran dana desa yang didapat lebih melihat dari program pemaksimalan peningkatan perekonomian desa, dan melihat dengan memfokuskan pembangunan di ranah pertanian.

Respon Masyarakat lainnya juga dirasakan oleh Wahyu sebagai salah satu pedagang toko kelontong di Desa Kedunglerep dan Jayus yang bekerja sebagai buruh selep di Desa Kedunglerep, peneliti disini mengambil

¹⁷ Wawancara dengan Jumani, Pengurus Posyandu Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Jumani.

perwakilan tanggapan pedagang dan buruh selep yang notabene sebagai acuan pembanding dan acuan pendapat yang ada di Masyarakat yang diluar dari petani , dan juga akan menjadi acuan lain tentang respon Masyarakat Desa Kedunglerep dari kebijakan-kebijakan Dana Desa yang ada di Desa Kedunglerep, tanggapan yang baik muncul dari tanggapan Wahyu yang menyatakan:

“sebenarnya pembangunan di desa Kedunglerep ini ya nampak-nampak saja, apalagi masyarakat Kedunglerep dalam pembangunan sering ikut andil atau diikut kerjakan untuk membangun programnya, dan saya rasa itu cukup membantu bagi warga yang butuh kerja untuk makan, tetapi kalau melihat dari pembangunan yang sekarang, kok yang kelihatan cumak pembangunan drainase ya di desa itu sendiri, yang selebihnya pembangunan banyak di JUT dan Rumah burung hantu,..ini menurut saya ya kurang efektif mas kalau ingin mensejahterakan semua masyarakat ya program-program yang lain ya harus diutamakan juga lah, terutama dalam program-program pemberdayaan desa, ini malah tidak malah tidak ada sama sekali, diadakan pemberdayaan di ranah peningkatan UMKM desa atau apa gitu, lumayan kecewa dengan pemerintahan yang sekarang”.¹⁸

Lain halnya dengan tanggapan Jayus sebagai buruh selep beras di Desa Kedunglerep menurutnya:

“kalau soal pembangunan dan Dana Desa ya mas, kurang tau mas saya, tapi yang saya ketahui kalau dalam pembangunan diDesa Kedunglerep ini lama-kelamaan perlahan kelihatan pembangunannya, apalagi kemaren kan ada BLT mas, itu juga sangat membantu masyarakat mas.. ya saya sebagai masyarakat ya ikut aja apa kewengan dari pemerintah desa, jujur saya gak ikut campur banyak mas soal komentar tentang pembangunan di desa, ya cukup menikmati saja apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Desa, walaupun toh ada Kecurangan atau Korupsi ya dosanya ditanggung sediri mas,...harapan saya gak muluk-muluk, semoga saja pemerintah amanah dalam membangun dalam membangun desa, kalau pemerintah amanah ya pastinya masyarakat akan sejahtera”.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Wahyu, Penjual Toko Kelontong Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Wahyu.

¹⁹ Wawancara dengan Jayus, Buruh Selep Beras Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Jayus.

Menurut Jayus, pembangunan-pembangunan di Desa Kedunglerep sudah selaras dengan apa yang masyarakat inginkan, dan menurutnya Masyarakat Desa Kedunglerep sudah sejahtera dengan apa yang pemerintah lakukan dengan kebijakan-kebijakan Dana Desanya. Menurut Jayus masyarakat hanya perlu percaya kepada kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa, namun jika Pemerintah Desa mengkhianati kepercayaan Masyarakat, pertanggungjawabannya akan ditanggung sendiri.

Dari informasi diatas masyarakat berharap bukti yang nyata untuk pembangunan di Desa Kedunglerep ini, dan kebanyakan melihat adanya pembangunan di Desa Kedunglerep ini, dengan begitu masyarakat berharap agar pemerintah jangan sampai melupakan program-program yang lain, dan dari informasi diatas baik dari Wahyu dan Jayus, sebagai bagian dari masyarakat Desa Kedunglerep, punya harapan tinggi kepada Pemerintah Desa dengan kewenangan kebijakan Pemerintah Desa untuk kesejahteraan mereka.

H. Implikasi Teori dan Temuan Data

Peneliti mencoba menyelaraskan data yang telah ditemukan di lapangan dengan teori AGIL Talcott Parsons. Melalui kajian teori yang telah dipaparkan peneliti pada bab awal dengan mempertimbangkan Implementasi dari teori tersebut kepada Masyarakat Desa.

Peneliti sendiri melihat hal tersebut dari penerapan langkah pertama yakni:

1. Pertama, **Adaptasi atau Adaptation**, Dimana Pemerintah Desa Kedunglerep mencoba untuk membuat inovasi-inovasi baru perihal peningkatan masyarakat desa yang mayoritas rata-rata memiliki pekerjaan sebagai petani. Adaptasi milik Parson ini memiliki maksud yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedunglerep tentang sistem yang harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Parson dengan adaptasi mengatakan bahwa suatu sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan penyesuaian itu harus berdasarkan kebutuhan-kebutuhan, hal ini pun berjalan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa kedunglerep dengan sentralisasinya yang banyak ke ranah pertanian, disini Pemerintah Desa melihat bahwa lingkungan dan kebutuhan yang paling banyak didominasi kebutuhan pertanian yang picu dengan mayoritas Masyarakat Desa Kedunglerep ialah Petani, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang banyak mengarah ke ranah

pembangunan infrastruktur pertanian, yang diperkuat dengan hasil musyawarah Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Kedunglerep, sehingga dari situlah sebab banyaknya muncul kebijakan-kebijakan Dana Desa yang lebih mengarah ke ranah pertanian.

Meski berbentuk kebijakan satu arah saja inovasi, namun bagi Warga Desa ini menjadi salahsatu bentuk Pemerintahan Desa untuk berinisiatif meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Petani di Desa Kedunglerep dengan dalih masyarakat paling membutuhkan pembangunan di ranah pertanian yang menjadi mayoritas pekerjaan di Desa Kedunglerep. Namun yang harus di garis bawahi adalah masyarakat disana tidak hanya berisi petani. Maka yang tersemat di benak peneliti adalah bagaimana cara menerapkan anggaran dengan lebih fleksibel dan merata. Karena di beberapa bidang layaknya pendidikan dan juga kesehatan masih belum bisa dirasakan manfaatnya.

Jika mengacu pada *Adaptation* milik parson, maka seharusnya pemerintah desa mencoba untuk beradaptasi juga dengan menyamaratakan pembangunan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan dan atau pemberdayaan-pemberdayaan *skill* pertanian inovatif sebagai upaya pemaksimalan pembangunan sentralisasi tersebut, agar pemerataan di bidang-bidang lain bias terjangkau setelahnya. Meski hal ini akan mengganggu tingkat efektifitas pembangunan yang pemerintah inginkan masyarakat petani yang mayoritas, karena tidak berfokus pada satu bidang. Namun setidaknya semua lini masyarakat merasakan dampaknya.

2. Kedua, ***Goal Attainment* atau pencapaian Tujuan**, Bila Pemerintah Desa ingin mengimplementasikan fokus mereka pada satu bidang. Maka hal tersebut akan semakin cepat untuk dicapai. Namun hemat peneliti, jika memang bidang itu adalah ranah pertanian di sektor infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan rumah burung hantu, maka implementasi Dana Desa tersebut kurang memenuhi semua kebutuhan bagi petani. Pasalnya implementasi tersebut tidak begitu berpengaruh karena pada zaman sekarang persoalan petani bukan halnya masalah infrastruktur, namun lebih kearah bagaimana petani bisa berkembang dengan sistem yang lebih modern. Contohnya adalah dengan upaya-upaya pemberdayaan petani

lewat edukasi tentang penyuluhan pertanian yang lebih organik, ataupun dengan edukasi pemasaran hasil tani melalui sistem *online*.

Pencapaian yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa Kedunglerep ialah dengan mempermudah akses Petani Desa Kedunglerep untuk memaksimalkan mereka dalam ranah akses jalan menuju sawah-sawah mereka, dan rumah burung hantu sebagai aksi penanggulangan hama yang mempengaruhi hasil panen mereka. Akan tetapi dengan kebijakan satu bidang yang adaptif tetapi kurang inovatif dari Pemerintah Desa ini, bisa dikatakan oleh peneliti, bahwa pembangunan satu bidang dengan pemaksimalan satu bidang ke bidang yang lain, akan berjalan kurang efektif dan lama, karena kurang updatenya pemerintah dalam membuat kebijakan, pencapaiannya akan selalu menemui jalan kurang maksimal.

Sayangnya seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti. Kekurangan perhatian dalam pembangunan di sektor lain seperti ranah pendidikan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas para petani secara langsung maupun tidak langsung.

Jika hasil dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa Kedunglerep dari upaya penyesuaian lingkungan dan penyesuaian dari kebutuhan-kebutuhan, maka seharusnya di tahap pencapaian tujuan, seharusnya Pemerintah Desa juga harus beradaptasi juga dengan perkembangan zaman. Jika Pemerintah Desa melakukan kebijakan di ranah satu bidang saja dan dibarengi dengan pemberdayaan-pemberdayaan yang inovatif untuk menyokong hasil lebih maksimal lagi di ranah pertanian, akan mempercepat upaya pemaksimalan-pemaksimalan di ranah lainnya. Sayangnya, pemerintah hanya berfikir di ranah infrastrukturnya saja, sehingga untuk pencapaian/*Goal* yang maksimal hanya di luarnya saja, akan tetapi Petani Desa Kedunglerep malah menemui ketidakmajuan dalam pertanyaannya.

Dalam pandangan Parson, hal ini dapat mengganggu siklus ketiga yakni:

3. **Integritas**, Ketika ketimpangan sosial dalam berbagai bentuk tidak diatasi terlebih dahulu. Maka hambatan selanjutnya adalah proses penyatuan berbagai lapisan masyarakat dalam satu sistem terstruktur akan semakin sulit. Maka perlu pengkajian kembali dan pengulangan proses dari awal seperti adaptasi.

Integritas yang dimaksud oleh parson disini yaitu sistem yang mengelola antara adaptasi, pencapaian, dan pemeliharaan pola. Dan nampaknya menurut peneliti, pemerintah Desa Kedunglerep dengan kebijakan-kebijakan dana desanya, sudah diawali dengan adaptasi yang baik, yaitu dengan penyesuaian diri dengan lingkungan dan penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan. Akan tetapi menurut peneliti, ditahap tujuan pencapaian, Pemerintah Desa dan kebijakan-kebijakan Dana Desanya terlalu banyak mengabaikan banyak hal penting seperti pemberdayaan-pemberdayaan inovatif dan pendidikan, dan kurangnya pemerintah mengikuti kemajuan zaman ranah pertanian modern.

Pemerintah desa jika ingin komponen-komponen yang dibangun dengan kebijakan-kebijakan penting dari dana desa berjalan sesuai fungsi, harus banyak perbaikan di ranah tahap pencapaian tujuan, jika adaptasi pemerintah desa kedunglerep dan masyarakatnya menghasilkan kebijakan satu arah, seharusnya untuk pencapaian goal dari kebijakan satu arah itu, pemerintah desa tidak mengabaikan komponen-komponen lain yang penting dalam memaksimalkan kebijakan satu arah tersebut, seperti komponen pemberdayaan yang dirasa sangat penting untuk petaninya sendiri selain infrastruktur.

Realitas fakta dilapangan, peneliti melihat dilapangan bahwasanya Pemerintah Desa masih berintegrasi dengan menjaga pola-pola pencapaian tujuan yang sama di ranah infrastrukturnya saja, bahkan di tahun 2023 ini, pencapaian tujuan kebijakan pemerintah masih sama, selain dari kebijakan lanjutan pembangunan jalan usaha tani, dan penambahan jalan usaha tani baru. Pemerintah dengan kebijakan satu arahnya masih berupaya berintegrasi menjaga fungsi komponen-komponen yang mereka mulai, walaupun disini peneliti melihat banyak ditemukan kurang maksimal di tahap pencapaian tujuan.

4. **Latensi/Pemeliharaan pola** akan cukup sulit untuk dilakukan tanpa banyak dilakukan perubahan dan pembenahan di tahap pencapaian tujuan. Bagaimanapun Parson menganggap bahwa sistem di Masyarakat tidak ubahnya seperti makhluk biologis dengan berbagai fungsi dan kebutuhan yang berbeda. Jika perhatian yang dibutuhkan kurang. Terhadap berbagai fungsi lain dan hanya ditujukan untuk satu hal saja. Maka akan terjadi ketimpangan dan sistem yang ideal tidak akan dapat terbentuk.

Peneliti melihat bahwa sistem kebijakan yang dibangun Pemerintah Desa Kedunglerep, akan sulit untuk mencapai tujuan pemeliharaan pola, karena sistem kebijakan Pemerintah Desa hanya berkuat di ranah integrasi, dan untuk pencapaian pemeliharaan pola parson, yang bilang bahwa sistem harus melengkapi, memelihara, dan menciptakan model budaya akan sulit karena disini peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa di tahap pencapaian tujuan melakukan kebijakan-kebijakan yang banyak mengabaikan hal-hal yang penting lainnya, bahkan untuk hal paling penting ranah kebijakan utamanya yaitu ranah pertanian masih mengabaikan pemberdayaan yang menjadi jalan meningkatkan *skill skill* inovatif untuk petaninya.

Untuk mencapai tahap pemeliharaan pola, Pemerintah Desa Kedunglerep harus melihat lagi dari awal, dimulai dari tahap adaptasi, seharusnya pemerintah bukan hanya melihat penyesuaian lingkungan dan kebutuhan di ranah pertanian saja, akan tetapi lebih ditinjau lagi tentang kebutuhan-kebutuhan penduduk selain pertanian, sehingga ketika ditahap pencapaian tujuan, ketika diadakannya Musyawarah Desa untuk kebijakan-Kebijakan Dana Desa dapat lebih banyak pilihan dalam menentukan kebijakan. Jika terjadi seperti itu, peneliti melihat potensi untuk pencapaian pemeliharaan pola yang menciptakan model budaya yang memotivasi akan tercapai dan masyarakat keseluruhan dan merasakan dampak dari adanya Dana Desa dan kebijakan-kebijakan yang ada.

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan Implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep sudah sesuai dengan PERMENDesPDPTT No.8 pasal 5 dan 6 tahun 2022-2023. Akan tetapi kurang maksimal di beberapa sektor bidang, dikarenakan Pemerintah Desa Kedunglerep lebih memfokuskan anggaran pembangunan di bidang tertentu, yaitu kebijakan pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani), Rumah Burung Hantu, dan *Drainase*, yang disini peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa Kedunglerep mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari anggaran Dana Desa lebih mengutamakan pembangunan di ranah dibidang pertanian, dengan pertimbangan bahwa untuk peningkatan Perekonomian Warga Desa Kedunglerep yang notabene mayoritas penduduk pekerjaanya petani,

Pemerintah Desa Kedunglerep beranggapan bahwa hal tersebut sudah sesuai untuk mencapai ke tingkat mensejahterakan Masyarakat Desa Kedunglerep.

Dampak Implementasi Kebijakan yang dirasakan oleh Masyarakat Desa Kedunglerep dari kebijakan-kebijakan Dana Desa yang ada, hampir kebanyakan mereka beranggapan bahwa langkah-langkah dari kebijakan yang lakukan oleh Pemerintah Desa Kedunglerep adalah langkah yang tepat, karena menurut Masyarakat Desa Kedunglerep, dengan pembangunan satu ranah yang notabene pembangunan yang hanya difokuskan untuk ranah pembangunan pertanian, mereka bisa melihat dan merasakan dengan jelas pembangunan di Desa. Yang sebelum-sebelumnya masyarakat Desa Kedunglerep yang kebanyakan tidak tahu atau tidak merasakan. Respon positif dari pembangunan Desa banyak ditemukan peneliti ketika mewawancarai petani-petani Desa Kedunglerep. Akan tetapi peneliti juga menemui respon kurang positif ketika mewawancarai Guru dan Pengurus Posyandu yang sadar akan kurangnya perhatian Pemerintah Desa Kedunglerep dalam Pembangunan di ranah-ranah lain.

Daftar Pustaka

- Bagong, D. N. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media, 2004
- Karimah, F. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 597-602, 2013.
- Kemendes.go.id. *Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi*. <https://idm.kemendes.go.id/rekomendasi>, Data Internet diakses Pada 12 Oktober 2022.
- Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1, 2, dan 3 Tahun 2022
- Media Universitas Indonesia. : *Peningkatan Partisipasi Politik Indonesia*. <https://www.uui.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/>, Data Internet Diakses pada 21 September 2022.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedunglerep Tahun 2022 dan tahun 2023.
- Ritzer, G. *Edisi Terbaru Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Salinan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, 2004.